



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi diberbagai bidang dalam kehidupan;
 - b. bahwa guna menjamin hak-hak perempuan agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

Dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perempuan adalah seseorang berjenis kelamin perempuan diluar definisi anak.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, masyarakat dan budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan.

8. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
9. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuannya.
10. Perlindungan terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu perlindungan khusus dan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Forum Koordinasi adalah sebuah forum yang bertujuan untuk memfasilitasi lembaga-lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan Gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun secara kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan;
- b. mencegah segala bentuk diskriminasi;
- c. memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Gender agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- d. mencegah dan menangani resiko dari kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- e. menurunnya kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan; dan

- f. menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan.

BAB II HAK KHUSUS PEREMPUAN

Pasal 4

Setiap perempuan memiliki hak khusus yaitu:

- a. hak dibidang politik dan pemerintahan;
- b. hak dibidang kewarganegaraan;
- c. hak dibidang pendidikan dan pengajaran;
- d. hak dibidang ketenagakerjaan;
- e. hak dibidang kesehatan;
- f. hak untuk melakukan perbuatan hukum; dan
- g. hak dalam ikatan/putusnya perkawinan.

BAB III PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI

Pasal 5

Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan, dapat dilakukan dengan upaya:

- a. Pemerintah Daerah memfasilitasi forum koordinasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- b. Bupati menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan forum koordinasi pemberdayaan perlindungan perempuan;
- d. Keanggotaan forum koordinasi pemberdayaan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari Perangkat Daerah, terkait instansi vertikal terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan dibentuk melalui keputusan Bupati;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi pemberdayaan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari upaya promotif, prefentif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Pemberdayaan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesatu
Upaya Promotif**

Pasal 7

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan;
- b. menyediakan materi-materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait pemberdayaan perempuan; dan
- c. menyelenggarakan sosialisasi advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pemberdayaan perempuan.

**Bagian Kedua
Upaya Prefentif**

Pasal 8

Upaya prefentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan gerakan massif dan berkelanjutan dalam pemberdayaan perempuan; dan
- b. melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan.

**Bagian Ketiga
Upaya Kuratif**

Pasal 9

Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan lembaga-lembaga dan pihak swasta dalam pemberdayaan perempuan; dan
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pemberdayaan perempuan.

**Bagian Keempat
Upaya Rehabilitatif**

Pasal 10

Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan tenaga pendamping dalam upaya pemberdayaan perempuan; dan
- b. memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses peningkatan pemberdayaan perempuan.

**BAB V
PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya perlindungan perempuan.
- (2) Perlindungan yang diberikan kepada perempuan meliputi:
 - a. Perlindungan kepada perempuan korban tindak kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi dan perdagangan orang; dan

- b. Perlindungan khusus yaitu perlindungan yang diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya, perempuan disabilitas, perempuan lanjut usia yang tidak mandiri, perempuan kepala keluarga, perempuan daerah rawan konflik dan bencana, perempuan bekerja, perempuan pengidap HIV, dan perempuan pekerja seks komersial;
- (3) Upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari upaya promotif, prefentif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (4) Perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu Upaya Promotif

Pasal 12

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar lembaga dalam upaya perlindungan perempuan;
- b. menyediakan materi-materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait perlindungan perempuan; dan
- c. menyelenggarakan sosialisasi advokasi dan kampanye sosial dalam rangka perlindungan perempuan.

Bagian Kedua Upaya Prefentif

Pasal 13

Upaya prefentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan;
- b. mengembangkan gerakan massif dan berkelanjutan dalam upaya perlindungan perempuan;
- c. melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan; dan
- d. menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga.

Bagian Ketiga Upaya Kuratif

Pasal 14

Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan lembaga-lembaga dan pihak swasta dalam perlindungan perempuan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka perlindungan perempuan;

- c. melakukan penanganan bagi perempuan korban tindak kekerasan yang meliputi pelayanan pengaduan, pelayanan rehabilitasi kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- d. mewajibkan pengusaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan untuk memberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Upaya Rehabilitatif

Pasal 15

Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan tenaga pendamping dalam upaya perlindungan perempuan; dan
- b. memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses peningkatan perlindungan perempuan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peran aktif dalam penyusunan kebijakan;
 - b. kerja sama; dan/atau
 - c. pengaduan/laporan.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Dalam hal Daerah mendapatkan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dari Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan monitoring.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (6) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan kepada Gubernur setiap tahunnya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Oktober 2016**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Oktober 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH

Pembina Utama Madya

NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK: 07.80.C/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Masalah Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang sangat urgen, sehingga perlu mendapatkan pengaturan dalam rangka menjaga martabat serta menjamin hak-haknya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Siak agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dalam bentuk peraturan Daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan belum ada pengaturan terhadap upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan di Daerah Kabupaten Siak sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya karena lebih menjelaskan pada petunjuk teknis kelembagaan.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur upaya perlindungan bagi perempuan khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan di Kabupaten Siak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas